

RINGKASAN

Maria Cordella Fidelia, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2016, PELAKSANAAN ASAS CONTRADICTOIRE DEKIMITATIE MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (STUDI KASUS DI DESA DUMBERSEKAR, KECAMATAN DAU, KABUPATEN MALANG), Prof. Dr. Moch.Bakri, SH. MS, Dr. Budi Santoso, SH. LLM.

Permasalahan terkait dengan tanah yang paling sering terjadi adalah penyerobotan batas tanah yang kemudian diklaim menjadi batas tanahnya. Hal tersebut terjadi karena alasan tanda batas yang kurang jelas. Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah memuat asas *Contradictoire Delimitatie*, yang merupakan langkah awal untuk menghindari adanya benih-benih sengketa pertanahan dalam proses pendaftaran tanah itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut maka masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang saat Pelaksanaan Asas *Contradictoire Delimitatie* menurut PP No. 24 th. 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan tentang bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang dalam menghadapi hambatan saat Pelaksanaan Asas *Contradictoire Delimitatie* menurut PP No. 24 th. 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep, jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen dan studi dokumentasi, teknik analisa bahan hukum yang digunakan adalah metode deskriptif analisis.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang saat Pelaksanaan Asas *Contradictoire Delimitatie* menurut PP No. 24 th. 1997 tentang Pendaftaran Tanah, adalah Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara pengukuran dan penetapan batas bidang tanah, Pada saat dilakukan pengukuran terhadap bidang tanah, tanah yang bersebelahan langsung sudah dibangun menjadi rumah atau bangunan fisik lainnya dan sudah tidak dapat diubah sertifikat dan luas tanahnya, Tidak Diketahuinya Pemilik Tanah Yang Bersebelahan Langsung Dengan Bidang Tanah Anggapan Masyarakat Diperlukan Biaya yang Mahal Untuk Melaksanakan Pengukuran Tanah, Pemilik tidak mengetahui pasti batas-batas bidang tanahnya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang dalam menghadapi hambatan saat Pelaksanaan Asas *Contradictoire Delimitatie* menurut PP No. 24 th. 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah Pengadaan penyuluhan atau sosialisasi yang terpadu dan berkesinambungan oleh pemerintah Desa Sumbersekar, Pelibatan perangkat desa, masyarakat terutama pemilik tanah yang berdampingan dalam proses pengukuran dan penetapan batas bidang tanah, menggunakan Prinsip Musyawarah Mufakat, Pengukuran kembali bidang tanah.

Dalam rangka pelaksanaan Asas *Contradictoire Delimitatie*, maka penulis memberikan saran sebagai berikut Kepada Badan Pertanahan Nasional agar lebih memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang penerapan Asas *Contradictoire Delimitatie* yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga tercipta kepastian hukum khususnya dalam bidang pertanahan dan Kepada masyarakat agar lebih aktif dalam memperhatikan kondisi tanahnya sesuai dengan sertifikat tanahnya dan menerapkan Asas *Contradictoire Delimitatie* sebagaimana yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.



SUMMARY

Maria Cordella Fidelia, Civil Law, Faculty of Law University of Brawijaya, July 2016, Implementation Of Contradictoire Delimitatie Principle According The Government Regulation Number 24 Of 1997 On Land Registration (Case Study Sumbersekar Village, District Dau, Malang Regency), Prof. Dr. Moch.Bakri, SH. MS, Dr. Budi Santoso, SH. LLM.

Problems associated with land most often happens is the appropriation of land boundaries and then claimed to be the limit of their land. This happens for reasons not clear boundaries mark. PP No. 24 of 1997 on Land Registration includes Contradictorie Delimitatie principle, which is the first step to avoid the seeds of land disputes in land registration process itself. Under these conditions, the issues raised in this paper is on the constraints faced by the people of the village Sumbersekar, District Dau, Malang current Implementation Contradictoire Delimitatie according to PP 24 th. 1997 on Land Registration and on how the efforts undertaken by the community Sumbersekar Village, District Dau, Malang regency in the face of obstacles when implementation of Principle Contradictoire Delimitatie according to PP 24 th. 1997 on Land Registration.

Research method used is the juridical sociological, while approach used is the concept, types and sources of data used are primary data and secondary data, data collection through interviews, document studies and documentation, legal materials analysis technique used is descriptive analysis method.

Constraints faced by the people of the village Sumbersekar, District Dau, Malang current Implementation Contradictoire Delimitatie according to PP 24 th. 1997, is the lack of public knowledge about the procedures for measurement and delimitation of land parcels, at the time of measurement of the area, the land immediately next to already built into the home or building other physical and it can not be altered certificates and spacious land, none knowledgeable landlord directly with its adjacent land area, community assumption required cost expensive to implement land measurement, the owners do not know for sure the boundaries of areas of land. The efforts undertaken by the people of the village sumbersekar, district dau district, malang to face obstacles when execution principles contradictoire delimitatie according to PP 24 th. 1997 is Procurement extension or socialization integrated and sustainable government Sumbersekar Village, Involving rural people, mainly adjoining landowners in the process of measurement and delimitation of land parcels, using the principle of Deliberation Consensus-Building, Measuring land area.

In the framework of the implementation of the principle of Contradictoire Delimitatie, the author gives the following advice To the National Land Agency in order to better provide public education about the application of the principle Contradictoire Delimitatie in accordance with Government Regulation No. 24 Year 1997 on Land Registration, thus creating legal certainty, especially in the areas of land and

community to be more active in taking into account the soil conditions in accordance with the land certificate and apply the principle of Contradictoire Delimitatie as in accordance with Government Regulation No. 24 Year 1997 .

